

ANALISIS PETA JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Mapping Analysis of Librarian Position within Ministry of Agriculture

Etty Andriaty, Penny Ismiati Iskak, dan Heryati Suryantini

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian
Jalan Ir. H. Juanda No. 20, Bogor 16122
Telp. (0251) 8321746; Faks. (0251) 8326561
E-mail: etty.andriaty@gmail.com

Diajukan: 8 Februari 2020; Diterima: 16 Mei 2020

ABSTRAK

Jumlah dan kualitas pustakawan Kementerian Pertanian yang beragam menimbulkan ketimpangan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan. Di sisi lain, peta jabatan pustakawan belum mencerminkan kebutuhan pustakawan pada masa mendatang dan belum memerhatikan SNI 7496:2009 dan SNP 006:2011 tentang Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui (1) keberadaan perpustakaan lingkup Kementerian Pertanian, (2) ketersediaan SDM perpustakaan sesuai dengan SNI Nomor 7496:2009, (3) beban kerja perpustakaan, (4) kebutuhan jabatan fungsional pustakawan, dan (5) hambatan dalam pengangkatan pustakawan. Hasil pengkajian menunjukkan hampir seluruh (98,49%) UK/UPT Kementerian Pertanian memiliki perpustakaan dan 93,75% UK/UPT memiliki tupoksi pengelolaan perpustakaan. Sebanyak 61,54% perpustakaan tidak memiliki petugas perpustakaan, 30,8% perpustakaan memiliki pustakawan keterampilan, dan 38,5% mempunyai pustakawan keahlian. Hambatan dalam pengangkatan pustakawan ialah tidak ada peta jabatan (41,67%), kurang peminat (29,17%), keterbatasan SDM (20,83%), dan tidak ada izin untuk alih jabatan dan tidak tersedia anggaran untuk tenaga kontrak (8,34%). Unit kerja dengan kebutuhan pustakawan tertinggi yaitu Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), rata-rata membutuhkan 11 pustakawan keterampilan dan 10 pustakawan keahlian, sementara yang terendah adalah Loka Penelitian (1 pustakawan keterampilan). Dari hasil kajian dapat direkomendasikan peta jabatan pustakawan Kementerian Pertanian sebagai berikut: (1) Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian 8 pustakawan keterampilan dan 24 pustakawan keahlian, (2) Puslit/Puslitbang, Sekretariat Badan/Biro/Direktorat/Balai Besar 1 pustakawan keterampilan dan 1 pustakawan keahlian, (3) PPMKP 2 pustakawan keterampilan dan 2 pustakawan keahlian, dan (4) Polbangtan 3 pustakawan keterampilan dan 3 pustakawan keahlian.

Kata kunci: Analisis peta jabatan; Kementerian Pertanian; Perpustakaan pertanian; Pustakawan

ABSTRACT

The varied number and quality of librarians at the Ministry of Agriculture lead to imbalances in library administration and management. On the other hand, the librarian position map does not reflect the future human resource needs and does not meet to SNI 7496:2009 and SNP 006:2011 concerning Special Libraries for Government Agencies. This study aimed to determine (1) the existence of libraries within the Ministry of Agriculture, (2) the availability of librarians in accordance with SNI 7496:2009, (3) workload of the libraries, (4) the need for librarian functional position, and (5) the obstacles in the appointment of librarians. The results showed that almost all (98.49%) institutions had libraries and 93.75% institutions had library management functions. Most of libraries (61.54%) did not have librarian, 30.8% libraries had skilled librarian, and 38.5% had expert librarian. The obstacles in the appointment of librarians were no position map (41.67%), less person interested to be librarian (29.17%), limited human resources (20.83%), and no permit to position transfer and no budget for contract labor (8.34%). The institution with the highest need for librarian was Agricultural Development Polytechnic (Polbangtan), i.e. 11 skilled librarians and 10 expert librarians, and the lowest was Research Station (one skilled librarian). From the study it can be recommended the position map for librarian within the Ministry of Agriculture as follows: (1) Indonesian Center for Agricultural Library and Technology Dissemination 8 skilled librarians and 24 expert librarians, (2) Research Centers/Research and Development Centers, Secretariat of Agency/Bureau/Directorate 1 skilled librarian and 1 expert librarian, (3) PPMKP 2 skilled librarians and 2 expert librarians, and (4) Polbangtan 3 skilled librarians and 3 expert librarians.

Keywords: Agricultural library; Analysis of position mapping; Librarians; Ministry of Agriculture

PENDAHULUAN

Perpustakaan khusus merupakan suatu perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga (pemerintah/swasta) atau

perusahaan yang mempunyai misi tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka tertentu dengan ruang lingkup subjek khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 2007), perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungan unit kerjanya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar unit kerjanya. Perpustakaan khusus bertujuan mendukung pencapaian visi dan misi organisasi induk dan berfungsi sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan pemustaka. Tugas dan fungsi perpustakaan khusus sama dengan tugas dan fungsi perpustakaan lainnya. Fungsi lain dari perpustakaan khusus yaitu sebagai pusat deposit (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 2017a; Iswati *et al.* 2018). Selain sebagai pusat rujukan, pusat deposit, dan pusat belajar masyarakat di lingkungan lembaga induk, perpustakaan di Kementerian Pertanian, juga mengemban tugas dalam penyebaran informasi teknologi pertanian.

Mengingat pentingnya fungsi perpustakaan, dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian pada Bab II Pasal 7 butir c dicantumkan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian terkait dengan perpustakaan, yaitu pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah-tangga, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi. Fungsi dokumentasi juga merupakan fungsi perpustakaan, yaitu pelestarian budaya, termasuk teknologi pertanian, hasil-hasil penelitian, dan informasi lain yang terkait. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 dinyatakan bahwa setiap unit pelaksana teknis (UPT) di Kementerian Pertanian mempunyai fungsi perpustakaan.

Kementerian Pertanian mempunyai 221 UPT. Jika setiap UPT melaksanakan fungsi perpustakaan maka di lingkup Kementerian Pertanian terdapat 221 perpustakaan. Pelaksanaan fungsi perpustakaan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 7496:2009 untuk perpustakaan khusus. Standar tersebut mengatur koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan, dan pengelolaan. Menurut SNI Nomor 7496:2009, jumlah tenaga di suatu perpustakaan minimal tiga orang yang terdiri atas kepala perpustakaan, pustakawan, dan tenaga teknis. Namun kenyataannya, jumlah dan kualitas pustakawan di perpustakaan lingkup Kementerian Pertanian tidak merata. Kondisi demikian menimbulkan ketimpangan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan,

yang pada akhirnya memengaruhi kualitas layanan dan kepuasan pemustaka. Di sisi lain, peta jabatan pustakawan yang tersedia saat ini belum mencerminkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) pada masa yang akan datang dan belum memperhatikan SNI 7496:2009 dan SNP 006:2011 tentang Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah.

Peningkatan kualitas SDM melalui literasi informasi menuntut kinerja ekstra perpustakaan dalam pelayanan informasi. Walaupun perpustakaan telah dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ketersediaan SDM yang memadai dan mumpuni masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Kekurangan SDM akan memperberat beban kerja perpustakaan dan memperburuk kualitas layanan. Mufid dan Wahyuningtyas (2016) menyatakan bahwa SDM menjadi penentu utama keberhasilan dalam menjalankan organisasi perpustakaan.

Kesuksesan perpustakaan bergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan keefektifan sumber daya manusianya (Purnomo 2004). Pendapat ini diperkuat oleh Suwarno (2016) yang menyatakan bahwa SDM menempati posisi strategis dalam menentukan keberhasilan organisasi. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM perpustakaan dapat dilakukan melalui pelatihan atau pendidikan baik formal maupun informal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, tugas pokok pustakawan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Tugas pokok tersebut berbeda untuk setiap jenjang jabatan. Demikian juga butir-butir kegiatan berbeda untuk setiap jenjang jabatan.

Pengangkatan jabatan fungsional pustakawan baru dan kenaikan jabatan pustakawan setingkat lebih tinggi disesuaikan dengan peta jabatan yang tersedia. Untuk mengetahui kebutuhan pustakawan di suatu perpustakaan perlu dilakukan analisis beban kerja. Tujuannya adalah untuk (1) menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas SDM; (2) meningkatkan kinerja perpustakaan; (3) mengoptimalkan layanan perpustakaan; dan (4) mendapatkan norma waktu penyelesaian kerja, volume kegiatan, standar dan prestasi kerja, tingkat efisiensi, standar prosedur operasi, dan efisiensi kerja.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan analisis beban kerja adalah volume pekerjaan suatu unit kerja (Pranoto dan Retnowati 2015). Volume pekerjaan merupakan perwujudan usaha yang dilakukan atau dikeluarkan. Satuan volume pekerjaan bisa berupa jam-orang kerja. Kualitas pengelolaan dan layanan perpustakaan yang beragam dan peta jabatan pustakawan yang belum mengantisipasi pengembangan perpustakaan pada era industri 4.0 berakibat terhambatnya pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka.

Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui (1) keberadaan perpustakaan lingkup Kementerian Pertanian, (2) ketersediaan SDM perpustakaan di UK/UPT Kementerian Pertanian, (3) beban kerja perpustakaan lingkup Kementerian Pertanian sebagai bahan penyusunan peta jabatan pustakawan dan rekomendasinya, (4) jumlah pustakawan yang dibutuhkan di setiap perpustakaan lingkup Kementerian Pertanian (termasuk rentang jenjang jabatannya), dan (5) hambatan yang dihadapi UK/UPT dalam pengangkatan tenaga pustakawan.

METODE

Pengkajian deskriptif ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai November 2019 dengan menggunakan metode survei. Populasi pengkajian adalah seluruh perpustakaan UK/UPT Kementerian Pertanian (221 perpustakaan). Sampel pengkajian ditentukan berdasarkan metode Slovin dengan *margin error* 10%. Dari 221 perpustakaan Kementerian Pertanian diperlukan sampel sebanyak 69 perpustakaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan membuat kluster berdasarkan tingkatan eselon dan status instansi (pusat atau daerah). Kluster mencakup eselon 2, eselon 3, dan eselon 4, selanjutnya setiap kluster dikelompokkan berdasarkan pusat dan daerah.

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur berdasarkan kuesioner. Kuesioner terdiri atas pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi terkait (1) keberadaan perpustakaan dan fungsinya dalam mendukung tugas institusi, (2) ketersediaan pustakawan dan pengelola perpustakaan di UK/UPT, dan (3) butir-butir kegiatan yang dilaksanakan oleh pustakawan di UK/UPT untuk penentuan analisis jabatan. Data sekunder diambil dari data kepustakawanan di Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan

Kementerian Pertanian dan data lain yang terkait dengan pengkajian. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Perpustakaan Lingkup Kementerian Pertanian

Perpustakaan UK/UPT Kementerian Pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan unit penyedia informasi untuk mendukung kegiatan pembangunan pertanian. Sebagai perpustakaan khusus, perpustakaan UK/UPT Kementerian Pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya visi misi lembaga induk melalui penyediaan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengambil kebijakan, pejabat fungsional terkait, staf, dan pemustaka lainnya. Oleh karena itu, tugas pokok dan fungsi pengelolaan perpustakaan di setiap UK/UPT menjadi suatu keharusan. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa hampir seluruh (98,49%) UK/UPT Kementerian Pertanian memiliki perpustakaan, dan 93,75% UK/UPT memiliki tupoksi pengelolaan perpustakaan. Perpustakaan dimanfaatkan oleh pemustaka internal, pemustaka dari unit kerja lain, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia Perpustakaan

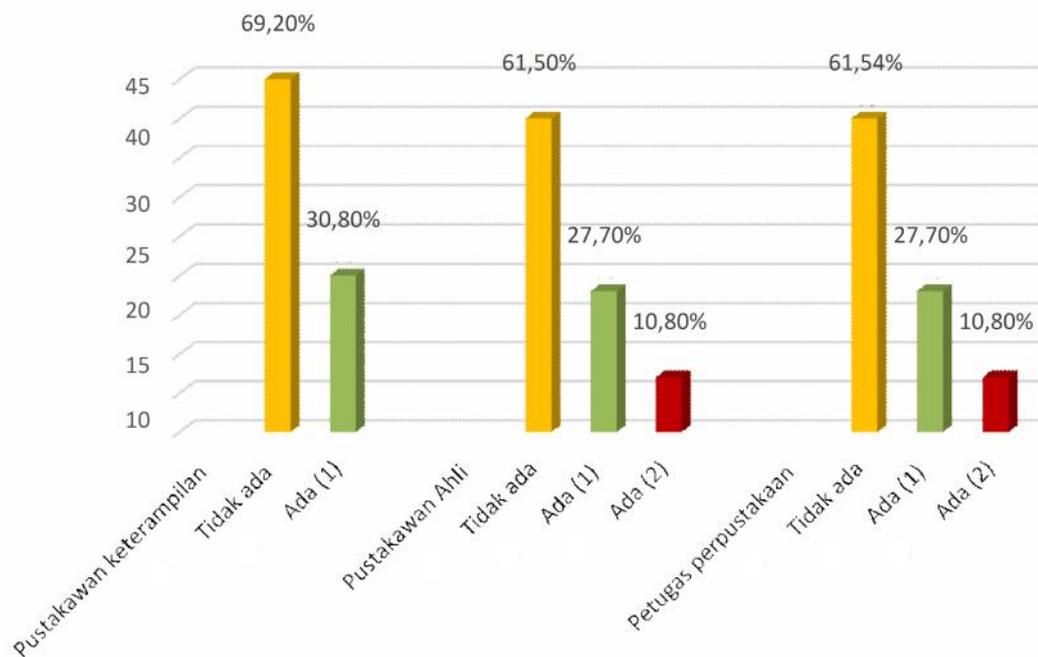
Era Industri 4.0 telah mengubah layanan perpustakaan dari sistem konvensional ke layanan *online* dan *offline* berbasis kebutuhan pemustaka. Ketersediaan SDM yang kompeten akan menjamin kualitas layanan perpustakaan. Di lingkup Kementerian Pertanian, 69,2% perpustakaan tidak mempunyai pustakawan keterampilan. Kegiatan pustakawan keterampilan meliputi melakukan survei sederhana kebutuhan informasi, menyusun dan mengelola data bibliografi dalam bentuk kartu dan basis data, daftar tambahan bahan perpustakaan, melakukan katalogisasi, menentukan klasifikasi dan tajuk subjek, melakukan alih data bibliografi secara manual dan elektronik, membuat kliping, membuat kelengkapan bahan perpustakaan, melestarikan koleksi perpustakaan, dan mengelola jajaran koleksi perpustakaan (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 2015). Ketiadaan pustakawan keterampilan di beberapa UK/UPT mengakibatkan kegiatan-kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Gambar 1 menunjukkan bahwa komposisi pustakawan keterampilan, pustakawan keahlian, dan petugas perpustakaan di UK/UPT Kementerian Pertanian bervariasi. Dua puluh perpustakaan (38,50%) memiliki pustakawan keahlian, yaitu 1 orang sebanyak 18 (27,7%) perpustakaan dan 2 orang 7 (10,8%) perpustakaan. Ketersediaan petugas perpustakaan lingkup Kementerian Pertanian serupa dengan ketersediaan pustakawan keahlian. Terdapat 40 (61,54%) perpustakaan yang tidak mempunyai petugas perpustakaan. Dari wawancara dengan penanggung jawab perpustakaan, perpustakaan yang tidak memiliki pustakawan berkaitan dengan peta jabatan, keterbatasan pengadaan SDM, skala perpustakaan, dan pemustaka yang berkunjung.

Menghadapi Era Industri 4.0, perpustakaan harus mengombinasikan layanan konvensional, layanan berbasis TIK, dan layanan berbasis literasi. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Priyanto (2019) bahwa pustakawan perpustakaan khusus berperan sebagai *information hub* yang mempertemukan teknologi pertanian dengan pengguna. Untuk itu diperlukan SDM yang berkualitas. Komaruddin dan Dewi (2012) menyatakan bahwa paradigma manajemen perpustakaan

saat ini mengutamakan tiga komponen utama, yakni pemberdayaan SDM dan sumber daya bukan manusia, layanan yang menjemput bola, dan pemberdayaan pemustaka. Keadaan ini menuntut organisasi perpustakaan dikelola oleh SDM yang memiliki kompetensi manajerial (*leading, planning, organizing* dan *controlling*), pengorganisasian bahan perpustakaan (*bibliographical and library technology know how, human relation skill*), kemampuan bekerja sama, sikap yang elit, elegan dan *intelligence*, berwawasan luas, dan kemampuan lain yang terkait.

Pustakawan perpustakaan khusus juga harus memiliki kompetensi pelayanan (berorientasi pengguna, berwawasan pengetahuan yang luas dan mendalam salah satu ilmu pengetahuan sosial, psikologi dan kebudayaan, memiliki pengetahuan tentang teknologi perpustakaan, memiliki kemampuan berkomunikasi, berpenampilan menarik, dll.). Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Moran dan Morner (2018) menyarankan rekrutmen pustakawan dan SDM pendukung harus memiliki kompetensi TIK. Selain itu, untuk menjamin kualitas layanan informasi, diperlukan pula evaluasi kinerja pustakawan dan petugas perpustakaan.



Gambar 1. Ketersediaan SDM perpustakaan di unit kerja/unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian.

Analisis Beban Kerja

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional pustakawan dilaksanakan sesuai dengan formasi. Formasi jabatan fungsional pustakawan adalah jumlah dan susunan jabatan/pangkat pustakawan yang diperlukan oleh unit kerja perpustakaan di instansi pusat dan daerah agar mampu melaksanakan tugas pokok kepustakawanan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat berwenang (Perpustakaan Nasional RI 2017b). Formasi pustakawan pada perpustakaan di instansi pusat dan daerah disusun berdasarkan analisis kebutuhan pustakawan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dan jumlah pustakawan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kepustakawanan sesuai dengan jenjang jabatannya. Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang pustakawan diperoleh dengan menghitung volume rata-rata setiap pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.

Jumlah Pustakawan yang Dibutuhkan

Hasil analisis beban kerja pustakawan dan pengelola perpustakaan lingkup Kementerian Pertanian (jumlah sampel 41) menunjukkan bahwa selain Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA), Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) memiliki kebutuhan pustakawan paling tinggi, baik jumlah maupun jenjang jabatannya (Tabel 1). Polbangtan rata-rata membutuhkan pustakawan keterampilan 11 orang dan

pustakawan keahlian 10 orang. Kementerian Pertanian memiliki enam Polbangtan, yaitu Polbangtan Medan, Polbangtan Bogor, Polbangtan Yogyakarta-Magelang, Polbangtan Malang, Polbangtan Gowa, dan Polbangtan Manokwari. Sementara institusi dengan kebutuhan pustakawan terendah adalah Loka Penelitian, yaitu hanya membutuhkan satu orang pustakawan keterampilan. Dari data tersebut, dengan mempertimbangkan peta jabatan serta sumber daya perpustakaan, direkomendasikan kebutuhan pustakawan di setiap UK/UPT Kementerian Pertanian seperti pada Tabel 2.

PUSTAKA merupakan unit kerja pembina bagi seluruh perpustakaan dan pustakawan Kementerian Pertanian. Untuk itu diperlukan pustakawan yang memiliki kompetensi tinggi dan mampu melakukan pembinaan dan bimbingan teknis maupun nonteknis kepada seluruh pustakawan Kementerian Pertanian. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, selain kualitas SDM, PUSTAKA juga memerlukan jumlah pustakawan yang memadai, terutama pustakawan keahlian (Pustakawan Pertama sampai Pustakawan Utama). Dalam kajian ini, data yang diambil dari PUSTAKA hanya data analisis jabatan pustakawan untuk menentukan kebutuhan pustakawan lingkup PUSTAKA. Hasil analisis memperlihatkan bahwa PUSTAKA membutuhkan 8 orang pustakawan keterampilan dan 24 orang pustakawan keahlian dengan rincian Pustakawan Terampil 2 orang, Pustakawan Mahir 3 orang, Pustakawan Penyelia 3 orang, Pustakawan Pertama 6 orang, Pustakawan Muda 8 orang, Pustakawan Madya 8 orang, dan Pustakawan Utama 2 orang.

Rekomendasi peta jabatan atau kebutuhan pustakawan di Puslit/Puslitbang, Sekretariat Badan/Direktorat/Biro, Balai Besar, Balit/BPTP, dan SMK

Tabel 1. Rata-rata kebutuhan pustakawan di unit kerja/unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian

Unit kerja	Jumlah pustakawan yang dibutuhkan						
	Terampil	Mahir	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	Utama
PUSTAKA	2	3	3	6	8	8	2
Puslit/Puslitbang	3	2	1	2	3	0	0
Sekretariat Badan/Direktorat/Biro	1	1	0	1	0	0	0
Polbangtan	7	3	1	4	5	1	0
Balai Besar	1	0	0	1	1	0	0
Balai/BPTP	1	0	0	1	1	0	0
Loka Penelitian	0	1	0	0	0	0	0
SMKPPN	2	1	0	1	0	0	0

Tabel 2. Kebutuhan pustakawan di unit kerja/unit pelaksana teknis (UK/UPT) Kementerian Pertanian

UK/UPT	Jumlah pustakawan yang dibutuhkan		Keterangan
	Keterampilan	Keahlian	
PUSTAKA	8	24	Sampai dengan Pustakawan Utama
Puslit/Puslitbang	1	1	Sampai Pustakawan Ahli Muda
Sekretariat Badan/Direktorat/Biro	1	1	Sampai Pustakawan Ahli Muda
PPMKP	2	2	Sampai dengan Pustakawan Ahli Muda
Polbangtan	3	3	Sampai dengan Pustakawan Ahli Madya
Balai Besar	1	1	Sampai dengan Pustakawan Muda
Balit/BPTP	1	1	Sampai dengan Pustakawan Muda
Loka Penelitian	1	0	Sampai dengan Pustakawan Penyelia
SMKPPN	1	1	Sampai dengan Pustakawan Muda

Pertanian Negeri sama, yaitu pustakawan keterampilan 1 orang (Pustakawan Terampil sampai Pustakawan Penyelia), dan pustakawan keahlian 1 orang Pustakawan (Pertama sampai Pustakawan Muda). Kesamaan ini karena selain hasil analisis beban kerja, jumlah koleksi, pemustaka, sarana dan prasarana yang tersedia relatif sama. Pemustaka yang dilayani pun hampir sama, yaitu peneliti, penyuluh, dan pemustaka lain dari dalam maupun dari luar instansinya.

Untuk Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) direkomendasikan peta jabatan pustakawan keterampilan 2 orang (Pustakawan Terampil sampai Pustakawan Penyelia) dan pustakawan keahlian 2 orang (Pustakawan Pertama sampai Pustakawan Muda). PPMKP membutuhkan lebih banyak pustakawan dibanding Puslit/Puslitbang, Sekretariat Badan/Direktorat/Biro, Balai Besar, Balai/BPTP, dan SMK Pertanian Negeri karena memiliki kekhususan sebagai lembaga diklat yang bertugas menghimpun dan mendokumentasikan tugas akhir peserta diklat yang setiap tahunnya cukup banyak. Hal ini menyebabkan penambahan koleksi yang cukup signifikan setiap tahunnya.

Kebutuhan pustakawan di Polbangtan lebih tinggi dibandingkan dengan UK/UPT lainnya, yaitu memerlukan minimal 3 orang pustakawan keterampilan (Pustakawan Terampil sampai Pustakawan Penyelia) dan 3 orang pustakawan keahlian (Pustakawan Pertama sampai Pustakawan Madya). Polbangtan memiliki kekhususan di antaranya: (1) pengadaan koleksi setiap tahun cukup banyak jumlahnya, baik melalui pembelian maupun berupa hibah/hadiah, juga tugas akhir mahasiswa; (2) beberapa Polbangtan memiliki dua lokasi

sesuai jurusannya, misalnya Polbangtan Bogor (di Cibalagung untuk Jurusan Pertanian dan di Cinagara untuk Jurusan Peternakan), Polbangtan Yogyakarta (di Yogyakarta untuk Jurusan Pertanian dan di Magelang untuk Jurusan Peternakan); (3) jumlah pemustaka lebih banyak (dosen, mahasiswa, dan sivitas akademika lainnya); (4) jam buka sampai malam (pukul 21.00), dan hari Sabtu juga buka, sehingga memerlukan bekerja secara bergiliran; dan (5) melakukan literasi informasi secara berkelanjutan terhadap dosen dan mahasiswa untuk mendukung kelancaran proses belajar-mengajar dan penyusunan tugas akhir mahasiswa. Literasi informasi merupakan tugas Pustakawan Madya. Perbedaan jumlah yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisis beban kerja dan rekomendasi karena pertimbangan peta jabatan dan sumber daya perpustakaan di setiap Polbangtan.

Kebutuhan pustakawan yang paling sedikit adalah di loka penelitian, yaitu satu orang pustakawan keterampilan dengan jenjang jabatan Pustakawan Terampil sampai Pustakawan Mahir. Hal ini karena jumlah koleksi dan pemustakanya lebih sedikit dibandingkan dengan UK/UPT lainnya.

Hambatan dalam Pengangkatan Pustakawan

Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional dapat melalui dua jalur, yaitu *inpassing* dan *reguler*. Pengangkatan jabatan fungsional pustakawan melalui jalur *reguler* untuk PNS yang memiliki ijazah Jurusan Ilmu Perpustakaan dapat diusulkan jika persyaratan administrasi telah terpenuhi. Sementara untuk PNS yang berpendidikan nonperpustakaan, harus memiliki sertifikat Diklat Calon Pustakawan terlebih dahulu. Selain masalah administrasi,

Tabel 3. Hambatan dalam pengangkatan pustakawan di perpustakaan Kementaerian Pertanian.

Hambatan	Frekuensi	Persentase
Tidak tersedia peta jabatan	10	41,67
Kurang peminat	7	29,17
Keterbatasan SDM	5	20,83
Tidak ada izin untuk alih jabatan	1	4,17
Tidak ada anggaran untuk tenaga kontrak	1	4,17

terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pengangkatan pustakawan seperti disajikan pada Tabel 3.

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa hambatan dalam pengangkatan pustakawan di UK/UPT Kementerian Pertanian adalah tidak tersedianya peta jabatan (41,67%), kurang peminat (29,17%), dan keterbatasan SDM (20,83%). Peta jabatan menjadi masalah utama dalam pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional pustakawan karena sampai saat ini belum ada revisi peta jabatan di Kementerian Pertanian. Peta jabatan bukan hanya mempengaruhi pengangkatan jabatan, namun juga pustakawan yang telah memiliki PAK untuk naik ke jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, sehingga beberapa pustakawan terhambat kenaikan jabatannya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Hampir seluruh (98,49%) UK/UPT Kementerian Pertanian memiliki perpustakaan dan 93,75% UK/UPT memiliki tupoksi pengelolaan perpustakaan. Sumber daya manusia yang tersedia di perpustakaan bervariasi. Sebanyak 61,54% perpustakaan tidak memiliki tenaga perpustakaan, 30,8% perpustakaan memiliki pustakawan keterampilan, dan 38,5% mempunyai pustakawan keahlian. Hambatan dalam pengangkatan pustakawan yaitu tidak ada peta jabatan (41,67%), kurang peminat (29,17%), keterbatasan SDM (20,83%), serta tidak ada izin untuk alih jabatan dan tidak tersedia anggaran untuk tenaga kontrak (8,34%).

Polbangtan membutuhkan pustakawan tertinggi, baik jumlah maupun jenjang jabatannya, yakni 11 pustakawan keterampilan dan 10 pustakawan keahlian, sementara yang terendah adalah Loka Penelitian (1

orang). Dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti peta jabatan, sumber daya perpustakaan, dan pemustaka, direkomendasikan kebutuhan pustakawan untuk Polbangtan minimal 3 pustakawan keterampilan (Pustakawan Terampil sampai Pustakawan Penyelia) dan 3 pustakawan keahlian (Pustakawan Pertama sampai Pustakawan Madya).

Rekomendasi

Sesuai dengan hasil kajian yang meliputi sarana/prasarana, jumlah koleksi, keragaman pemustaka, dan beban kerja pustakawan, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. PUSTAKA membutuhkan 8 pustakawan keterampilan dan 24 pustakawan keahlian dengan rincian Pustakawan Terampil 2 orang, Pustakawan Mahir 3 orang, Pustakawan Penyelia 3 orang, Pustakawan Pertama 6 orang, Pustakawan Muda 8 orang, Pustakawan Madya 8 orang, dan Pustakawan Utama 2 orang.
2. Puslit/Puslitbang, Sekretariat Badan/Direktorat/Biro, Balai Besar, Balit/BPTP dan SMK Pertanian Negeri masing-masing memerlukan satu pustakawan keterampilan (Pustakawan Terampil sampai Pustakawan Penyelia) dan satu pustakawan keahlian (Pustakawan Pertama sampai Pustakawan Muda).
3. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) membutuhkan 2 pustakawan keterampilan (Pustakawan Terampil sampai Pustakawan Penyelia) dan 2 pustakawan keahlian (Pustakawan Pertama sampai Pustakawan Muda).
4. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) membutuhkan minimal 3 pustakawan keterampilan (Pustakawan Terampil sampai Pustakawan Penyelia) dan 3 pustakawan keahlian (Pustakawan Pertama sampai Pustakawan Madya).
5. Loka Penelitian membutuhkan satu pustakawan keterampilan (Pustakawan Terampil sampai Pustakawan Mahir).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standardisasi Nasional. (2009). *Standar Nasional Indonesia: 7496:2009. Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Iswati, Ariwibowo, H., dan Ignatius, J. (2018). Peran pustakawan pada perpustakaan khusus dalam menunjang kinerja internal

- lembaga konsultan manajemen (sebuah kajian literatur). *Jurnal Eksekutif*, 15 (1): 42-52. <https://jurnal.ibmt.ac.id/index.php/jeksekutif/article/view/167>. [diakses Oktober 2019].
- Komaruddin, Y.T.S. & Dewi, L. (2012). Manajemen sumber daya manusia di perpustakaan. *EduLib*, 2(2): 252-270.
- Moran, B.B. dan Morner, C.J. (2018). *Library and Information Center Management*. Santa Barbara: Libraries Unlimited. 548 p.
- Mufid & Wahyuningtyas. (2016). Pemetaan kebutuhan SDM berdasarkan analisis beban kerja (ABK) dan mutu layanan perpustakaan di Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Libraria*, 4(2): 267-288. jurnal.stainkudus.ac.id/index.php/Libraria/article/view/1760. [diakses Oktober 2019].
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. <http://www.litbang.pertanian.go.id/regulasi/78/file/Permentan-43-2015-Net-TTD.pdf>. [diakses Oktober 2019].
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian. <http://www.hukumonline.com>.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2015). Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2017a). Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2017b). Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan. https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/Perka_26_2017_Pedoman_Penyusunan_Formasi_JFP.pdf [diakses Oktober 2019].
- Pranoto, L.H. & Retnowati. (2015). Analisis Beban Kerja. Gudang Penerbit Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
- Priyanto, I.F. (2019). *Peran Strategis Perpustakaan Digital Pertanian dalam Menyebarkan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertanian*. Disampaikan pada Temu Teknis Pengembangan Perpustakaan Digital Kementerian Pertanian, Surabaya, 18 Juni 2019.
- Purnomo, P. (2004). Pembinaan dan pengembangan SDM perpustakaan pada lembaga pendidikan. *Al-Maktabah*, 6(1): 125-139.
- Suwarno, W. (2016). Mengembangkan SDM perpustakaan dalam rangka menuju *World Class University*. *Libraria*, 4(1), 105-126.